

REALITY OF OBSTACLES OF IAS 41 (BIOLOGICAL ASSETS) FOR MSMEs FISHERIES AND FARMING IN EAST JAVA

REALITA HAMBATAN PENCATATAN IAS 41 (ASET BIOLOGIS) BAGI UMKM PERIKANAN DAN PETERNAKAN DI JAWA TIMUR

Mar'a Elthaf Ilahiyah, I Made Laut Mertha Jaya

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

email: mar'aelthafilahiyah@stesia.ac.id

Submit : 2020-06-09; Revision : 2020-09-15; Publish : 2020-09-25
Gorontalo Accounting Journal, 3(2): 94-104

ABSTRACT

Biological assets are a unique type of asset, because they undergo growth transformation, and are able to produce an output. This transformation consists of the process of growth, degeneration, production and procreation that can cause a variety of changes qualitatively and quantitatively the life of the asset. This study aims to determine the problem of the reality of obstacles in the application of recording IAS 41 for SMEs fisheries and farming in East Java. Data collection was carried out through the Group Group Discussion (FGD) grouping technique. This data is then processed through three stages, namely: 1) data reduction, 2) data presentation, 3) data analysis and drawing conclusions based on predetermined theories. The results showed that market prices that occurred in Indonesia could not be used as a basis for measuring the value of biological assets in some MSMEs fisheries and farming in East Java. This is because some MSME fisheries and farming actors in East Java are still doing their own estimates in accordance with the conditions of their biological assets. Thus, existing market prices give rise to unreliable information, which allows changes in estimates that differ from time to time according to the life of biological assets.

Keywords: *Biological Assets; MSMEs Accounting*

ABSTRAK

Aset biologis merupakan jenis aset yang unik, karena mengalami transformasi pertumbuhan, dan mampu menghasilkan sebuah *output*. Transformasi ini terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi dan prokreasi yang dapat menyebabkan berbagai perubahan secara kualitatif dan kuantitatif kehidupan aset tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan realita hambatan pada penerapan pencatatan IAS 41 bagi pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengelompokan *Forum Group Discussion* (FGD). Data ini selanjutnya diolah melalui tiga tahapan, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) analisis data dan penarik kesimpulan berdasarkan teori yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar yang terjadi di Indonesia tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran atas nilai *asset* biologis pada sebagian UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan beberapa pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur masih melakukan estimasi sendiri sesuai dengan kondisi aset biologis yang dimilikinya. Sehingga, harga pasar yang ada menimbulkan informasi yang tidak andal, yang memungkinkan adanya perubahan estimasi yang berbeda setiap waktu sesuai umur aset biologis.

Kata Kunci : Aset Biologis; Akuntansi UMKM

1. PENDAHULUAN

Setiap data yang disampaikan di laporan keuangan sangat penting untuk manajemen, pemilik maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan (Kieso, 2014). Sehubungan dengan upaya penyusunan laporan keuangan yang baik, maka pemilihan dan penggunaan metode akuntansi yang tepat menjadi hal penting untuk diperhatikan. Metode akuntansi yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis industri perusahaan. Pemilihan metode akuntansi yang tepat untuk digunakan oleh entitas dapat memastikan kesesuaian terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masing-masing elemen laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Namun, perbedaan penggunaan metode untuk perlakuan akuntansi entitas sangat mungkin terjadi, khususnya pada beberapa jenis industri yang unik dan memiliki karakteristik khusus.

Entitas yang bergerak di industri *agriculture* memiliki dan mengelola aset berupa tanaman perkebunan yang cenderung lebih rumit perlakuannya berdasarkan pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya di laporan keuangannya. Mulanya, entitas akan melakukan penilaian aset-aset mereka yang berupa hewan dan tanaman berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 14 tentang persediaan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang aset tetap. Namun, dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia, maka aset yang dari aktivitas dan berhubungan dengan *agriculture* disebut dengan aset biologis. Salah satu perubahan pencatatan dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia, yaitu penggunaan nilai wajar. Penggunaan model nilai wajar dalam IAS 41 untuk aset biologis dan hasil agrikultur ini diyakini merupakan standar akuntansi yang menyediakan “*a good conceptual framework*” dan manfaat lainnya (Argiles, Aliberch, & Blandon, 2012; Ariyanto, Sukendar, dan Kurniawati, 2014). Penggunaan model nilai wajar juga dapat mendorong transparansi dan pengambilan keputusan yang baik karena model nilai wajar ini mencerminkan kondisi pasar saat itu (Menicucci & Paolucci, 2017).

Namun, penggunaan model nilai wajar ini menuai banyak kritik karena beberapa hal. Salah satu kontroversi tersebut adalah anggapan bahwa pendekatan yang digunakan IAS 41 *too academic* dan tidak fokus pada praktik pelaporan aset biologis (Elad & Herbohn, K., 2011). Sehingga, penggunaan model nilai wajar ini di beberapa penelitian masih diragukan. Penggunaan nilai wajar lemah dari sisi keandalan informasi dan kemudahan untuk dipahami karena nilai wajar berpijak pada harga pasar arbitrer yang masih bersifat subjektif (Fisher, Mortensen & Webber, 2010). Beberapa penelitian sebelumnya juga menyimpulkan bahwa penerapan *mark-to-market* sulit dipahami oleh penyusun maupun pengguna laporan keuangan, karena terlalu akademis dan akan sangat sulit dipahami lagi pada negara berkembang (Elad & Herbohn, K., 2011). Di sisi lain, penggunaan model nilai wajar juga memakan lebih banyak biaya dalam mendapatkan informasi harga wajar, terutama untuk entitas-entitas pelapor pada beberapa negara berkembang (Elad & Herbohn, K., 2011). Selain itu, penggunaan nilai wajar juga dapat menimbulkan volatilitas pada laporan keuangan laba rugi yang dilaporkan entitas dan sering kali gagal untuk menangkap substansi ekonomi yang sebenarnya terjadi (Fontes, Panaretou, & Peasnell, 2018).

Aset biologis merupakan jenis aset yang berupa tanaman dan hewan hidup. Aset biologis terus mengalami perubahan, pertumbuhan serta kemerosotan hingga menghasilkan. Aset biologis memiliki karakteristik yang unik pada perusahaan industri perkebunan maupun peternakan. Karakteristik unik dan

berbeda dari usaha lain umumnya membuat perusahaan yang bergerak dalam bidang ini memiliki kemungkinan keterjadian menyajikan informasi secara bias, jika dibandingkan dengan perusahaan di bidang lainnya (Ridwan, 2011; Kumalasari, 2012; Putri, 2014; Harum, 2014).

Kondisi wilayah Indonesia sangat cocok untuk industri perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kondisi ini pula yang menjadikan satu alasan tersendiri mengapa banyak tumbuh entitas perikanan, perkebunan, dan peternakan di Indonesia.

Tabel 1. Potensi Tangkapan Perikanan di Indonesia

No.	Nama Wilayah	Potensi Bisnis Perikanan
1.	Simeuleu, Aceh	36.000 ton potensi tangkapan per tahun
2.	Natuna, Kepulauan Riau	542.000 ton potensi tangkapan per tahun
3.	Nunukan, Kalimantan Utara	338.000 ton potensi tangkapan per tahun
4.	Talau, Sulawesi Utara	135.000 ton potensi tangkapan per tahun
5.	Morotai, Maluku Utara	1.228.000 ton potensi tangkapan per tahun
6.	Biak Numfor, Papua Barat	1.997.000 ton potensi tangkapan per tahun
7.	Sarmi, Papua	299.000 ton potensi tangkapan per tahun
8.	Mentawai, Sumatera Barat	270.000 ton potensi tangkapan per tahun
9.	Rote Ndao, NTT	17.000 ton potensi tangkapan per tahun
10.	Moo, Maluku	200.000 ton potensi tangkapan per tahun
11.	Saumlaki, Maluku	36.000 ton potensi tangkapan per tahun
12.	Tual, Maluku	1.729.000 ton potensi tangkapan per tahun
13.	Timika, Papua	183.000 ton potensi tangkapan per tahun
14.	Merauke, Papua	125.000 ton potensi tangkapan per tahun

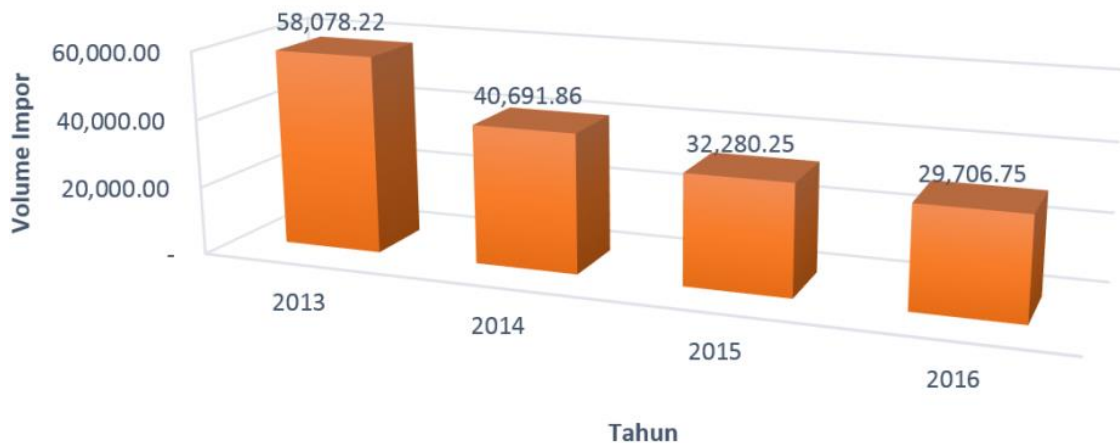
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2016.

Data pada tabel 1 menunjukkan besarnya potensi negara Indonesia untuk pengembangan bisnis perikanan. Entitas yang bergerak pada sektor industri perikanan, utamanya bidang pertambakan, memiliki karakteristik khusus terkait dengan penyusunan laporan keuangannya. Sehingga, perlu adanya sebuah peningkatan kualitas bisnis dan informasi bisnis yang disajikan oleh perusahaan melalui periodisasi laporan kinerjanya kepada pihak luar (calon investor), agar dapat lebih mengembangkan usaha dan saling memakmurkan satu sama lain.

Di Provinsi Jawa Timur pun sangat potensial untuk pengembangan bisnis Perikanan Budidaya dan Tangkap yang cukup besar. Pada tahun 2015 jumlah produksi Perikanan Budidaya mencapai 1.093.121,5 ton sedangkan Perikanan Tangkap mencapai 399.867,4 ton. Sedangkan, jumlah Unit Pengolah Ikan menengah sampai besar mencapai 180 unit dengan jumlah ekspor melebihi 200.000ton per tahun. Dalam pemenuhan konsumsi masyarakat di Jawa Timur yang rata-rata mencapai 30 kg/kapita/tahun, maka stok bahan baku ikan tersebut masih dapat dikatakan mencukupi. Namun, menurut hasil survey Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, menemukan bahwa terdapat beberapa unit pengolah ikan yang kapasitas produksinya menurun hampir 40%. Hal ini dikarenakan ketersediaan pasokan bahan baku ikan untuk industri mengalami penurunan. Seiring dengan adanya kebijakan mengimpor komoditas perikanan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, maka beberapa perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor (API) dapat meminta rekomendasi untuk penerbitan ijin impor sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Rekomendasi ijin impor

dikeluarkan oleh Dinas Provinsi yang berwenang di Bidang Perikanan. Sedangkan, ijin impor diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Realisasi impor komoditas perikanan dari tahun 2013-2016 telah mengalami penurunan rata-rata 20% tiap tahunnya.

Gambar 1. Perkembangan Impor Produk Perikanan Tahun 2013-2016



Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur, 2017.

Komoditas perikanan yang diijinkan mengimpor bahan bakubertujuan untuk di ekspor kembali, sehingga menghasilkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, selalu berupaya dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku produk perikanan. Berbagai macam program aplikatif telah dilakukan untuk dapat menormalkan kembali stok sumber daya ikan di laut teritorial Indonesia. Pemerintah telah bekerjasama membangun Rumah Ikan dan *Underwater Restocking*, Revitalisasi sejumlah Pelabuhan Perikanan, Pembersihan Armada dan Alat Tangkap Ikan yang digunakan nelayan, Revitalisasi Tambak, Pengembangan Budidaya Ikan di Laut dan Pengendalian Jaminan Mutu terhadap produk yang beredar di Jawa Timur.

Gambar 2. Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
PROGRAM PRIORITAS KKP 2019	
PERIKANAN TANGKAP	
300 unit	Kapal Perikanan 5 GT dan < 5 GT
1 unit	60 GT
2.000 unit	Alat Penangkapan Ikan
170.000 premi	Asuransi Nelayan
15.000 bidang	Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan
2.120 kelompok	Fasilitas KUB menjadi Koperasi
7 WPP	Partisipasi RFMO & kerjasama perikanan tangkap internasional
300 unit	Observer di atas kapal perikanan
4 lokasi	SKPT
22 lokasi	Pelayanan Pelabuhan Perikanan
40 paket	Perekayasaan & Operasional BPPI
PENGLOLAAN RUANG LAUT	
5 lokasi	Demaga Apung
1.000 ha/lokasi	PUCAR di 23 kabupaten
700.000 ha	Pencadangan kawasan konservasi dan konservasi kawasan perairan
36 RZ	Rencana Zonasi
20 jenis	Konservasi Jenis Ikan
20 kelompok	Bantuan KOMPAK
20 pulau	Sertifikasi Pulau Terluar
100 pulau	Pembakuan Nama Pulau
4 lokasi	SKPT
PERIKANAN BUDIDAYA	
215 Juta	Benih dan Calon Induk
80 ekor	Kebun Bibit Rumpul Laut Kultur Jaringan
20 paket	Excavator
250 paket	Biotek
400 paket	Minapadi
55 paket	Mesin dan Bahan Baku Pakan
5.000 ha	Asuransi Usaha Budidaya
1.250 ton	Operasional Pabrik Pakan Skala medium
4.860 paket	Pengujian Residu Produk Budidaya dan Sertifikasi untuk Ekspor
3 lokasi	SKPT
PENGUATAN DAYA SAING	
8 unit	Ice Flake Machine 5-10 ton
70 unit	Ice Flake Machine 1,5 ton
35 paket	Gamarikan
1 unit	Pasar Ikan Modern
300 unit	Sarana Sistem Rantai Dingin (Chest freezer, Cool Box)
28 unit	Kendaraan berpendingin
3 paket	Pameran Internasional
12 paket	Marine Business Forum
1 paket	Layanan STELINA, layanan perikanan, penerapan, dan pengujian produk hasil IP, layanan sertifikasi kelayakan pengolahan, layanan rekomendasi impor
2 lokasi	SKPT

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur juga berupaya mendorong peningkatan kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis perikanan di beberapa Kabupaten melalui sinergi antara nelayan/pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar), perbankan hingga ritel. Program ini difasilitasi dengan proses kemitraan dari hulu sampai hilir, seperti nelayan sebagai penyedia bahan baku, pelaku usaha pengolahan ikan, penyedia *cold storage* hingga pelaku distribusi dan pemasaran. Hal ini tentu mendorong minat masyarakat di Kabupaten yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah tertarik dalam industri perikanan dan pertambakan. Sehingga, mereka memilih memulai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang perikanan dan peternakan karena masih adanya lahan yang dapat digunakannya sebagai tempat budidaya perikanan.

Namun, kendala utama yang masih menjadi pelaku UMKM perikanan dan peternakan ini adalah permasalahan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang semestinya. Pencatatan ini secara khusus menyoroti tentang aset biologis yang dimiliki oleh pelaku UMKM perikanan dan peternakan. Menurut IAS 41 (2000) dalam Ridwan (2011) aset biologis dapat diklasifikasikan sebagai aset biologis dewasa dan aset biologis belum dewasa. Aset biologis dewasa adalah aset yang sudah mencapai spesifikasi untuk dipanen (aset biologis konsumsi). Sedangkan, aset biologis belum dewasa adalah aset biologis yang mampu mempertahankan hasil panen seperti biasanya atau secara rutin (aset biologis pembawa). Sehingga, aset biologis dapat dibedakan ke dalam aset lancar (*current assets*) dan aset tak lancar (*non current assets*) (Ridwan, 2011). Sehingga, selama ini para pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur masih banyak yang tidak dapat mengembangkan usahanya karena kesulitan dalam melakukan pencatatan aset biologis di dalam penyusunan laporan keuangannya. Sehingga, elemen aset biologis selama ini hanya dicatat sebagai aset pada umumnya saja. Padahal, Aset biologis diakui sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Kategori aset lancar dimasukkan ke dalam persediaan sebagai hewan ternak produksi jangka pendek dan aset tidak lancar dikategorikan ke dalam aset tetap atau aset lainnya sebagai hewan ternak produksi jangka panjang (Cahyani dan Vita, 2014). Kondisi ini tentunya menjadi kendala besar jika usaha ini ingin berkembang bermitra dengan perbankan melalui penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar.

Tujuan dari adanya laporan keuangan yang baik, utamanya adalah agar dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dengan kinerja laporan keuangan entitas bisnis lain yang sejenis (PSAK No.1, 2015:1). Tujuan lainnya yang paling dibutuhkan untuk pengembangan usaha yaitu untuk memperlancar proses pengajuan sebagai mitra pemerintah dan menambah jumlah permodalan agar lebih mendorong maju usahanya. Kendala lainnya, yaitu pada proses pencatatan yang telah berlangsung selama ini belum mencatumkan jumlah aset biologis pada usaha kelompok tani tersebut. Untuk itu, penelitian ini, dilakukan berdasarkan fenomena masih adanya beberapa pelaku UMKM perikanan dan peternakan yang belum mengetahui perlakuan IAS 41 secara baik dan benar di laporan keuangannya. Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada pemerintah tentang kendala-kendala yang masih dialami oleh pelaku UMKM perikanan dan peternakan dalam menyusun laporan keuangan terutama perlakuan IAS 41. Berdasarkan teori regulasi menyatakan

bahwa pembentukan regulasi terkait dengan beberapa kepentingan dan kepentingan tersebut terkait dengan konsekuensi yang akan diterima pengguna atas pembentukan regulasi (Kieso, 2014). Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan perusahaan yang diperlukan agar pemakai maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan solusi kepada pemerintah dan masyarakat umum tentang perlakuan IAS 41 secara baik dan benar agar kelangsungan usahanya dapat bertahan lama. Berdasarkan uraian teori stakeholder menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Soewardjono, 2014). Sehingga, ketika kegiatan yang dilakukan oleh UMKM perikanan dan peternakan sudah sesuai, terutama dalam hal pencatatan aset biologisnya, maka hal ini diharapkan dapat memudahkan UMKM perikanan dan peternakan dalam hal pengajuan permodalannya agar dapat mengembangkan usaha dan keberlangsungan usahanya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif *Forum Group Discussion* (FGD). Teknik FGD mempermudah pengambil keputusan bagi peneliti serta membantu memudahkan memahami sikap, keyakinan, ekspresi dan istilah yang biasa digunakan oleh peserta mengenai topik yang dibicarakan (Atmadja, 2013). Sehingga, sangat berguna untuk mengerti alasan-alasan yang tidak terungkap dibalik respons peserta. Dengan FGD juga dapat mempercepat memperoleh temuan-temuan baru dan sekaligus penjelasannya, yang mungkin tidak terdeteksi jika menggunakan teknik lain. Namun demikian, karena jumlah peserta FGD tidak banyak, maka hasil FGD tidak dapat digeneralisasikan atau digunakan sebagai kesimpulan umum untuk populasi atau kelompok yang lebih luas dari peserta FGD. Teknik pengumpulan data kualitatif FGD relatif lebih mudah diselenggarakan daripada teknik pengumpulan data kualitatif yang lain. Tulisan ini dimaksudkan dapat menyegarkan kembali ingatan peneliti mengenai beberapa kaidah dalam FGD yang perlu diperhatikan agar hasil FGD dapat maksimal, berdasarkan studi penelusuran pustaka.

Untuk menentukan jumlah kelompok FGD, maka dibentuk beberapa kriteria sebagai berikut: (1) Terkait dengan lamanya usaha UMKM perikanan dan peternakan, (2) Jumlah Pendapatan Bersih per Tahun kurang lebih \geq 50 juta, (3) Mendapat Bantuan Pinjaman dari Lembaga Perbankan.

Tabel 2. Sampel Penentuan *Focus Group Discussion* UMKM Tambak Jawa Timur

Kategori Pemilihan UMKM di Jawa Timur	Jumlah UMKM	Jumlah Kelompok Diskusi
Lamanya Usaha UMKM bidang perikanan dan peternakan kurang lebih 20 tahun	35 UMKM	5 Kelompok
Jumlah Pendapatan Bersih per Tahun \geq 50 Juta	35 UMKM	5 Kelompok
Mendapat Bantuan Pinjaman dari Lembaga Perbankan	30 UMKM	5 Kelompok
Jumlah	100 UMKM	15 Kelompok

Sumber: Data Olahan, 2020.

Pada pelaksanaan *focus group discussion*, pertanyaan pada sampel penelitian berupa pertanyaan terbuka (*open-ended question*), dapat bebas mengungkapkan opini terhadap pertanyaan yang dikemukakan yang terdiri dari 4 butir pertanyaan, meliputi:

- 1) Bagaimana Pengakuan, Pengukuran dan Penggolongan Aset Biologis pada UMKM di Jawa Timur;
- 2) Apa yang menjadi hambatan Utama dalam Melakukan Pencatatan IAS 41 Aset Biologis?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Analisis

Analisis kualitatif dilakukan dengan menggali informasi dari beberapa narasumber melalui FGD (Forum Group Discussion) sebagai berikut.

Tabel 3. Pengakuan, Pengukuran dan Penggolongan Aset Biologis pada UMKM di Jawa Timur

Opini Pelaku UMKM Terhadap Aset Biologis dan Penerapan IAS 41	Frekuensi	Ranking
1. Aset Biologis adalah istilah asing yang tidak banyak diketahui oleh kalangan UMKM di Jawa Timur	55	1
2. Aset biologis berupa aset biologis dewasa dan aset biologis belum dewasa diukur sebesar nilai wajar dikurangi taksiran biaya untuk menjual	45	2
TOTAL	100	3

Sumber: Hasil pengelompokan FGD, 2020.

Berdasarkan hasil FGD di atas dapat dipastikan sebagian besar pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur banyak yang tidak mengetahui istilah aset biologis. Aset biologis merupakan aset yang mengalami transformasi, aset yang akan mengalami pertumbuhan setiap waktu sehingga pengakuan atas aset biologis dilakukan dari benih ikan hingga menjadi besar. Pada saat itu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk ikan harus dicatat sampai dengan ikan tersebut panen. Berdasarkan yang saya tulis di latar belakang bahwa masih terdapat banyak permasalahan pada UMKM di Jawa Timur terkait pencatatan aset biologis khususnya industri perikanan dan peternakan. Sebelum menerapkan IAS 41 dalam pengakuannya beberapa UMKM terkait industri perikanan dan peternakan mengakui adanya amortisasi pada aset perikanan dan peternakan yaitu segala aset biologis (hewan) yang menghasilkan. Namun, setelah penerapan IAS 41 pengakuan aset biologis (hewan), seperti ikan dan sapi menghasilkan; serta ikan dan sapi yang belum menghasilkan tidak terdapat akumulasi amortisasi. Pengakuan aset biologis yang dicatat dalam perusahaan adalah aset perikanan dan peternakan yang belum menghasilkan dan yang menghasilkan.

Tabel 4. Hambatan Utama dalam Melakukan Pencatatan IAS 41 Aset Biologis

Opini	Frekuensi	Rating
1. Penyusunan Laporan Keuangan Dianggap Membingungkan, apalagi istilah dalam penyajian pengakuan aset biologis.	55 UMKM	1
2. Pelaku UMKM perikanan dan peternakan yang sudah cukup ahli dalam melakukan praktik penyajian aset biologis.	45 UMKM	2

Sumber: Hasil pengelompokan FGD, 2020.

Menurut PSAK 16 yang mengatur tentang bagaimana perlakuan aset dalam akuntansi dapat kita tentukan sendiri bahwa memang secara harfiah aset biologis memiliki sebuah karakteristik yang berbeda. Tetapi, PSAK 16 tetap merupakan pedoman yang digunakan oleh industri UMKM perikanan dan peternakan maupun perkebunan untuk menilai bagaimana dampak perubahan depresiasi aset pada aset biologis. Penilaian nilai depresiasi pada PSAK 16 didasarkan atas bagaimana sebuah aset memiliki kandungan informasi lengkap atas segi biaya yang dihasilkan. Memang secara harfiah aset tetap dapat dikurangkan dari nilai depresiasi atas penyusutan manfaat ekonomis yang mana metode akuntansi menawarkan metode garis lurus maupun *double declines*, tetapi apabila kita berbicara tentang konteks aset biologis maka hal ini akan menjadi berbeda. Pada saat kita berbicara mengenai aset biologis pengukuran atas nilai depresiasi didapatkan dari informasi mengenai penggunaan biaya produksi pada saat benih masih berupa “bibit atau benih” hingga menjadi fisik aset yang siap untuk dipanen dan dijual, jika kita amati dari segi fisiknya. Oleh karena itu, disarankan bagi pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa timur agar mencatat detail pengeluaran bruto yang dihasilkan dengan seksama serta dapat memperkirakan bagaimana kiranya nilai yang tertera di dalam laporan keuangan.

3.2. Pembahasan

Pada sub bagian ini akan dilakukan pembahasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya. Pembahasannya sebagai berikut.

3.2.1 Pengukuran Aset Biologis Berdasarkan IAS 41.

Di dalam IAS 41 pengukuran asset biologis diukur sesuai dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan, kecuali jika nilai wajar tidak dapat diukur secara *reliable* dalam kondisi lain nilai historis dapat digunakan. Dasar yang digunakan sebagai dasar penentuan nilai wajar adalah nilai pasar. Hanya, jika elemen keuangan memiliki pasar aktif, dan pasar aktif ini juga menjadi pedoman untuk menilai keadaan asset yang sebenarnya, tempat aset, kondisi, yang sesuai pada tanggal neraca. Akan tetapi, jika untuk hal-hal khusus tidak layak atau sulit dilakukan penilaian wajarnya, maka dibolehkan menilai dengan *historical cost*. Berikut merupakan cara menentukan nilai wajar pada terkait pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur, yaitu:

1. Harga pasar transaksi terbaru, asalkan belum ada perubahan signifikan dalam keadaan ekonomi antara tanggal transaksi dan periode akhir pelaporan;

2. Harga pasar untuk aset serupa dengan penyesuaian
3. *Benchmark*, nilai ternak dan perikanan yang dinyatakan per kilogram.

Nilai wajar yang digunakan oleh pelaku UMKM perikanan dan peternakan adalah harga per kg, yaitu harga yang berlaku saat terjadinya transaksi. Jika ada kontrak harga tetap dapat mengakibatkan nilai wajar dari aset biologis tidak disesuaikan karena adanya kontrak.

3.2.2 Pengungkapan dan Penyajian Aset Biologis Berdasarkan IAS 41 Perikanan dan Peternakan.

Salah satu entitas yang wajib menerapkan IAS 41 dalam pengungkapannya, yaitu pelaku UMKM Perikanan dan Peternakan di Jawa Timur. Pencatatan aset biologis menurut IAS 41 tidak mengakui adanya depresiasi, maka pada laporan laba/rugi tidak ada akumulasi depresiasi yang berakibat adanya kenaikan pada laporan laba/rugi. Umumnya, laporan arus kas oleh para pelaku UMKM perikanan dan peternakan tidak menjelaskan mengenai konsep laporan arus kas secara jelas, hanya saja pada IAS 41 ini menggunakan metode *fair value*, yaitu nilai yang saat ini sedang berlaku, sehingga akan lebih relevan. Sedangkan, penerapan metodenya belum memiliki ketentuan secara pasti.

3.2.3 Hambatan Utama dalam Melakukan Pencatatan IAS 41 Aset Biologis

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa hambatan dan hambatan utama pelaku UMKM perikanan dan peternakan dalam melakukan pencatatan IAS no. 41, diantaranya

- 1) Adanya pemberlakuan pencatatan transaksi keuangan berdasar standar IAS 41 membuat para pelaku UMKM perikanan dan peternakan perlu untuk mengevaluasi kembali metode pencatatannya selama ini. Hal ini dikarenakan beberapa pencatatan yang dilakukan masih keliru dan perlu untuk dicatat ulang sesuai IAS No. 41.
- 2) Secara umum, pelaku UMKM perikanan dan peternakan selama ini hanya beberapa yang telah memahami pencatatan laporan keuangan berdasarkan IAS No. 41, yaitu sebanyak 45 pelaku UMKM. Sedangkan sisanya, yaitu 55 pelaku UMKM perikanan dan peternakan masih belum memahami, sehingga dibutuhkan penyuluhan-penyuluhan secara berkala untuk membantu menambah ilmu pengetahuan mereka dan pembetulan laporan keuangannya ke arah yang lebih baik.
- 3) Hal utama yang masih menjadi kendala pelaku UMKM perikanan dan peternakan melakukan pencatatan IAS No. 41 ialah tingkat pengetahuan dari pelaku UMKM yang beberapa masih lulusan tidak sarjana membuat mereka kesulitan dalam memahami IAS No. 41 secara dasar. Sehingga, mereka sangat membutuhkan bantuan pendamping yang dapat membantunya melakukan pencatatan laporan keuangan dengan lebih baik.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dalam pembahasan dan temuan mengenai aset biologis yakni: (1) Secara harfiah pengukuran aset pada prinsip IFRS menggunakan prinsip nilai wajar untuk pengakuan aset, namun apabila kita telaah secara seksama khususnya untuk aset biologis bahwa nilai wajar tidak dapat memberikan asumsi yang valid dan kredibel. Hal ini dikarenakan penggunaan nilai wajar akan memberikan dampak nilai yang bias karena penjual dan pembeli memiliki asumsi yang berbeda atas subyektifitas,

sehingga kondisi ini dapat membuat dampak akhir pada laporan keuangan hasilnya menjadi bias. (2) Dari sisi penyajian, bagaimana laporan akuntansi disajikan oleh pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur masih cenderung menggunakan pedoman yang belum baku dalam pelaporan akuntansi, sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan oleh pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, perlu adanya pembekalan dan pelatihan wawasan tentang tata cara mencatat informasi terkait dengan proses bisnis yang mereka lakukan dengan semestinya. (3) Dari segi transparansi dan akuntabilitas, kelompok pelaku UMKM perikanan dan peternakan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur. Namun, alangkah baiknya apabila setiap koordinator kelompok UMKM perikanan dan peternakan ini diberikan bekal terkait pengembangan sistem pencatatan berbasis komputer yang teroganisir dengan standar akuntansi terutama pencatatan IAS No. 41 yang semestinya, sehingga mengurangi dampak kesalahan pada pelaporan keuangan.

4.2 Saran

Beberapa saran yang terkait dengan hasil penelitian ini, diantaranya: (1) Akibat tidak adanya standar yang berperan dalam penentuan harga bibit benih aset biologis, maka seharusnya segera dilakukan pengujian terhadap harga historis oleh para akademisi dan praktisi serta pemerintah untuk fokus menyelesaikan persoalan tersebut. (2) Aset biologis banyak dihadapkan pada resiko ketidakpastian di dalam akuntansi. Oleh karena itu, resiko ini harus segera diminimalisir dengan baik oleh para pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur. (3) Perlu diadakan sebuah pelatihan dan pembekalan mengenai akuntansi khususnya dari segi pencatatan aset biologis (IAS No. 41) bagi para pelaku UMKM perikanan dan peternakan di Jawa Timur.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Argiles, J., Aliberch, A. & Blandon, J. (2012). A Comparative study of difficulties in accounting preparation and judgement in agriculture using fair value and historical cost for biological assets valuation. *Spanish Accounting Review*, 15 (1), pp. 109-115.
- Ariyanto, Stefanus, Heri Sukendar, dan Heny Kurniawati. (2014). Penerapan PSAK Adopsi IAS 41 Agriculture. *BINUS BUSINESS REVIEW*, Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 186-193
- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. (2013). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
- Cahyani, Ranny dan Vita, Aprilina. (2014). Evaluasi Penerapan Sak Etap Dalam Pelaporan Aset Biologis Pada Peternakan Unggul Farm Bogor. *Jurnal RAK*, Vol. 5 No. 1.
- Elad, C., & Herbohn, K. (2011). *Implementing Fair Value Accounting in the Agricultural Sector*. London: The Institute of chartered Accountants of Scotland.
- Fisher, R., Mortensen, T. & Webber, D. (2010). Fair value accounting in the agricultural sector: an analysis of financial statement preparers perception before and after the introduction of ias 41 agriculture. *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ) Conference, Christchurch*, 4-6 July, at: www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php.

- Fontes, Joana C., Argyro Panaretou, & Kenneth V. Peasnell. (2018). The Impact of Fair Value Measurement for Bank Assets on Information Asymmetry and the Moderating Effect of Own Credit Risk Gains and Losses, *The Accounting Review* (2018) 93 (6): 127–147. <https://doi.org/10.2308/accr-52070>
- Harum D.N, Desti. (2014). Deplesi Aset Biologis Pada Peternakan Sapi Perah KUD Boyolali. *Jurnal Riset Akuntansi*. Universitas Nuswantoro.
- Kieso, Donald E. Jerry J.Weygandt, Paul D. Kimmel. (2014). *Accounting Principles Pengantar Akuntansi Edisi 7 Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kumalasari, Dian Dwi. (2012). IAS 41: Tinjauan Kritis Terhadap Pengakuan Dan Pengukuran Aset Biologis Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Menicucci, Elisa & Guido Paolucci. (2017). Fair Value Accounting within a Financial Crisis: An Examination of Implications and Perspectives. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 8, No. 2; February 2017.
- Putri, Sulistyorini Rafika. (2014). Analisis Perbandingan Pelaporan Dan Pengungkapan Aset Biologis Sebelum Dan Sesudah Penerapan IAS (International Accounting Standard) 41 Pada PT. Asta Argo Lestari, Tbk. *Skripsi*. Unversitas Negeri Surabaya.
- Ridwan, Abd Achmad. (2011). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Persero)*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Soewardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.